



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024





LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #7 2024

“Kontroversi Kenaikan UMP: Keseimbangan Perlindungan Pekerja dan Pengusaha dalam Hukum Perburuhan

Oleh: Andi Muhammad Fathir Aditya Perdana

A. PENDAHULUAN

Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 6,5 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 mengenai Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja serta daya saing usaha, dan juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.¹ Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di setiap wilayah. Penetapan UMP biasanya dilakukan berdasarkan sejumlah faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas pekerja, dan kemampuan daya beli masyarakat. Kebijakan ini tentu bersinggungan dengan beberapa dasar hukum, salah satunya ialah Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan kerangka regulasi yang mengatur kenaikan UMP, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja tanpa merugikan keberlanjutan dunia usaha. Namun kenyataannya, kebijakan ini memunculkan kontroversi, karena terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan kebutuhan pengusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi perusahaan mereka. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi topik yang kontroversial dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Di satu sisi, kenaikan UMP dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak, sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus berkembang. Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat

¹ Ruruh Handayani, ‘UMP Dan UMK Resmi Naik Di 2025, Begini Penghitungan Dan Ketentuan Lengkapnya!’ (PAJAK.COM 8 December 2024) accessed 13 December 2024.





penting karena pekerja adalah tokoh utama yang dilindungi oleh kebijakan tersebut. Dalam proses penetapan, pekerja diwakili oleh serikat buruh dalam Dewan Pengupahan, tetapi posisi tawar mereka sering kali lemah dibandingkan dengan pengusaha.

Di sisi lain, pengusaha memiliki kedudukan penting dalam diskusi mengenai kenaikan UMP karena mereka adalah pihak yang langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat, pengusaha mengkhawatirkan dampak jangka panjang pada keberlangsungan usaha mereka.² Kebijakan ini dipandang sebagai beban tambahan bagi pengusaha, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang harus menyesuaikan diri dengan kenaikan tersebut di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu. Kebijakan kenaikan UMP nyatanya juga berdampak besar kepada pekerja dengan meningkatnya UMP, perusahaan cenderung lebih selektif dalam merekrut pekerja baru untuk menghindari tambahan biaya. Walaupun kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja, namun nyatanya ini menjadi *boomerang* bagi pekerja karena sulitnya perusahaan mengakomodir distribusi kenaikan upah.

Berangkat dari polemik permasalahan di atas ALSA LC Unhas mengadakan ALSA Study Club (ASC) #7 dengan mengangkat tema “Kontroversi Kenaikan UMP: Keseimbangan Perlindungan Pekerja dan Pengusaha dalam Hukum Perburuhan” guna mengupas lebih dalam mengenai dinamika kontroversi terkait kenaikan UMP, dengan fokus pada bagaimana peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan yang saling bertentangan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana definisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengaturannya di Indonesia?
2. Bagaimana proses penetapan UMP di Indonesia?
3. Bagaimana kerangka hukum UMP sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja?
4. Bagaimana dan apa saja faktor kenaikan UMP di Indonesia?

² Riani Sanusi Putri and Kodrat Setiawan, ‘Imbas Kenaikan Upah Minimum Provinsi’ (Tempo 3 December 2024) accessed 13 December 2024.





5. Bagaimana dampak kebijakan kenaikan UMP berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. PEMBAHASAN

1. Definisi dan Pengaturan Penetapan Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Terhitung setiap tahun Indonesia kerap kali mengeluarkan kebijakan berupa kenaikan UMP dengan berbagai dinamika dan juga situasi tertentu, melalui Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 88 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi. UMP berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha dalam memberikan gaji kepada pekerja, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak mereka agar mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup di daerah tersebut. Dengan demikian, UMP tidak hanya berperan dalam menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di wilayah terkait. UMP secara general terdiri dari UMP dan UMK. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli resmi meneken Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, melalui aturan tersebut upah minimum provinsi atau UMP 2025 menetapkan rumusan penghitungan berdasar pada Pasal 2 Ayat (2) yang dihitung sebagai berikut:

- $UMP\ 2025 = UMP\ 2024 + \text{Nilai Kenaikan UMP 2025}$

Lalu, pada Pasal 2 Ayat (3) disebutkan, nilai kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024.³

Selain itu, penetapan UMP di Indonesia juga diatur dalam beberapa regulasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana pemerintah dapat menetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/burut atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah

³ Inten Esti Pratiwi, 'Perkiraan UMP 2025 Di 38 Provinsi Dengan Kenaikan 6,5 Persen' (*KOMPAS.com* 5 December 2024) <<https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/05/170000665/perkiraan-ump-2025-di-38-provinsi-dengan-kenaikan-6-5-persen>> accessed 13 December 2024.





Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

2. Kerangka Hukum UMP terhadap Adanya Undang-undang Cipta Kerja

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada tahun 2020 dan diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023, membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap kerangka hukum yang mengatur UMP. Melalui UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 88 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagai upaya untuk memenuhi hak pekerja atas penghidupan yang layak. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMP dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.⁴ UU Ciptaker mengubah banyak aspek dari undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, termasuk pengaturan tentang UMP. Perubahan pengaturan UMP dapat dilihat dari beberapa poin, sebagai berikut:

- Penghapusan Upah Minimum Sektoral: Sebelum adanya UU Cipta Kerja terdapat ketentuan mengenai upah minimum sektoral yang memungkinkan adanya penetapan upah berdasarkan sektor tertentu. Dengan hadirnya UU Cipta Kerja, penetapan upah kini lebih terfokus pada UMP sebagai patokan utama, sehingga mengurangi variasi upah antar sektor.⁵
- Formula Penghitungan Upah: Penetapan UMP kini menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tanpa adanya batas atas atau bawah dalam perhitungan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar daerah, di mana daerah dengan ekonomi lemah mungkin menetapkan UMP yang lebih rendah.

⁴ SIP Law Firm, 'Dasar Hukum Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)' (16 November 2023) <<https://siplawfirm.id/dasar-hukum-kenaikan-upah-minimum-provinsi-ump/?lang=id>> accessed 13 December.

⁵ Patrick Winson Salim, 'Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja' (2023) Vol. 7 Jurnal Kewarganegaraan 1599.





Kerangka hukum UMP dalam UU Cipta Kerja dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pengusaha dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan mikro. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menuai kritik, khususnya dari kalangan pekerja yang merasa bahwa kebutuhan hidup layak mereka belum sepenuhnya terakomodasi.

3. Faktor Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan hukum. Kerangka pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan peraturan turunannya, khususnya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi penetapan dan kenaikan UMP:

- **Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**
KHL merupakan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara fisik, non-fisik, dan sosial. KHL dihitung berdasarkan kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah menggunakan KHL sebagai salah satu acuan utama dalam menentukan besaran UMP agar pekerja dapat hidup dengan layak.⁶
- **Inflasi**
Inflasi mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa di masyarakat. Semakin tinggi inflasi, semakin besar tekanan terhadap daya beli pekerja, sehingga kenaikan UMP diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi pekerja. Dalam peraturan terbaru, inflasi menjadi salah satu variabel utama

⁶ Berita Bisnis, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan UMR, UMK, Dan UMP' (*kumparan* March 2024) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penetapan-umr-umk-dan-ump-22GSLGGkvZ1>> accessed 13 December 2024.





dalam perhitungan UMP untuk memastikan bahwa kenaikan upah mampu menutupi kenaikan biaya hidup.⁷

- **Pertumbuhan Ekonomi (PDB)**

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Jika ekonomi suatu daerah tumbuh pesat, maka kemampuan daerah untuk menaikkan UMP juga meningkat. Pendekatan dalam UU Cipta Kerja: PP 36/2021 menekankan penggunaan data pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dasar dalam menentukan UMP, dengan tujuan menjaga daya saing ekonomi di tingkat provinsi.

- **Kondisi Pasar Tenaga Kerja**

Faktor seperti tingkat pengangguran, ketersediaan tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja memengaruhi proses penentuan kenaikan UMP. Jika suatu daerah memiliki angka pengangguran yang tinggi, kenaikan UMP yang signifikan dapat membebani pengusaha, yang berpotensi memperburuk pengangguran. Sebaliknya, di daerah yang kekurangan tenaga kerja, kenaikan UMP dapat menarik lebih banyak pekerja, sekaligus mengurangi perpindahan tenaga kerja ke wilayah lain.

Kenaikan UMP adalah hasil dari pertimbangan berbagai faktor, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga dinamika pasar tenaga kerja. Dengan kerangka hukum yang ada, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pekerja untuk mendapatkan upah layak dengan kemampuan pengusaha dalam menjaga keberlanjutan usaha. Tantangan utama adalah memastikan kebijakan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan stabilitas ekonomi nasional.

4. Dampak kebijakan kenaikan UMP berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Zidni Hudan Said Purnomo Lebih lanjut di: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ump-2024-naik-adakah-dampak-perpajakannya>, 'UMP 2024 Naik, Adakah Dampak Perpajakannya? Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/Index.php/Id/Artikel/Ump-2024-Naik-Adakah-Dampak-Perpajakannya>' (5 Autumn 2023) <<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ump-2024-naik-adakah-dampak-perpajakannya>> accessed 13 Spring 2024.





Kebijakan kenaikan UMP didorong oleh berbagai faktor, salah satu faktor terbesar ialah untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Namun hal ini nyatanya memberikan dampak yang menunjukkan ketidakseimbangan antara para pekerja dan pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, kedua pihak tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih kepentingan. Hal ini dapat kita lihat pada masing-masing dampak yang diterima antara pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan kenaikan UMP.

- Dampak terhadap pekerja

Kebijakan kenaikan UMP terhadap pekerja merupakan wujud perlindungan negara dalam memberi, melindungi, dan menghormati hak konstitusional warga negara dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hasil ratifikasi perjanjian PBB tentang *Internasional Covenan Economi Civil and Political Right* (ICECPR) yang dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2005 tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁸ Dalam hal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pekerja menjadi subjek utama yang dilindungi oleh kebijakan tersebut yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap eksploitasi upah yang tidak layak sekaligus memastikan bahwa pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penetapan UMP, yang didasarkan pada indikator seperti kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁹ Kedudukan pekerja sebagai pihak yang memperoleh upah dari tempat kerja dalam hal ini perusahaan tentu menjadi indikator tersendiri untuk menerapkan upah hasil kenaikan tersebut, sehingga hal ini memicu kesenjangan UMP antarprovinsi di beberapa daerah dalam menghadapi ketidakmerataan kesejahteraan. Meskipun UMP bertujuan melindungi hak pekerja, tantangan dalam implementasi seperti praktik penghindaran upah minimum oleh pengusaha dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa kedudukan pekerja perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang efektif. Dengan upaya ini, kenaikan UMP

⁸ Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

⁹ Liputan6.com, 'HomeFeeds Memahami Upah Minimum Provinsi Di Indonesia, Ini Arti Dan Pengaruhnya Bagi Pekerja' [2019] liputan6.com accessed 13 Desember 2024.





dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan ekonomi bagi para pekerja.

- Dampak terhadap pengusaha

Pengusaha dalam kebijakan ini menjadi pihak yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen yang mulai berlaku pada tahun 2025 memberikan dampak signifikan bagi pengusaha. Peningkatan biaya operasional, yang dapat mencapai 15-18 persen dari total biaya produksi, berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk dan mengurangi daya saing di pasar domestik dan internasional. Dalam upaya mengatasi beban biaya, banyak pengusaha mungkin terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dapat memperburuk situasi ketenagakerjaan. Selain itu, ketidakpastian terkait kebijakan pengupahan yang sering berubah menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Kenaikan UMP juga dapat membuat produk Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, sehingga berisiko mengurangi daya tarik investasi asing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan insentif kepada pengusaha agar mereka dapat beradaptasi dengan kebijakan ini tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha.

Dua dampak di atas menunjukkan bahwasanya kebijakan kenaikan UMP menunjukkan terjadinya tumpang tindih antara pihak pekerja dan pengusaha yang keduanya saling terkait terhadap kesejahteraan dan juga *flow* dari daya beli dan kehidupan masyarakat.

D. PENUTUP

Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Landasan hukumnya, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menegaskan pentingnya UMP sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi. Kenaikan UMP mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan





upah layak bagi pekerja dengan kemampuan pengusaha menjaga keberlanjutan usaha, berdasarkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan ini mendukung keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan stabilitas ekonomi nasional.

Di satu sisi, kenaikan UMP dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. Namun di sisi lain, pengusaha, terutama dari sektor UKM, menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan biaya operasional, yang dapat memengaruhi stabilitas usaha dan peluang kerja. Polemik ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha melalui regulasi yang adil dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang efektif.





DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Artikel Online

Berita Bisnis, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan UMR, UMK, Dan UMP' (*kumparan* March 2024) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penetapan-umr-umk-dan-ump-22GSLGGkvZ1>> accessed 13 December 2024.

Inten Esti Pratiwi, 'Perkiraan UMP 2025 Di 38 Provinsi Dengan Kenaikan 6,5 Persen' (*KOMPAS.com* December 2024) <<https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/05/170000665/perkiraan-ump-2025-di-38-provinsi-dengan-kenaikan-6-5-persen>> accessed 13 December 2024.

Liputan6.com, 'HomeFeeds Memahami Upah Minimum Provinsi Di Indonesia, Ini Arti Dan Pengaruhnya Bagi Pekerja' [2019] liputan6.com accessed 13 Desember 2024.

Riani Sanusi Putri and Kodrat Setiawan, 'Imbas Kenaikan Upah Minimum Provinsi' (*Tempo* 3 December 2024) accessed 13 December 2024.

Ruruh Handayani, 'UMP Dan UMK Resmi Naik Di 2025, Begini Penghitungan Dan Ketentuan Lengkapnya!' (*PAJAK.COM* 8 December 2024) accessed 13 December 2024.

SIP Law Firm, 'Dasar Hukum Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)' (16 November 2023) <<https://siplawfirm.id/dasar-hukum-kenaikan-upah-minimum-provinsi-ump/?lang=id>> accessed 13 December.

Zidni Hudan Said Purnomo Lebih lanjut di: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ump-2024-naik-adakah-dampak-perpajakannya>, 'UMP 2024 Naik, Adakah Dampak Perpajakannya? Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ump-2024-naik-adakah-dampak-perpajakannya>' (5 Autumn 2023) <<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ump-2024-naik-adakah-dampak-perpajakannya>> accessed 13 December 2024.

Jurnal

Patrick Winson Salim, 'Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja' (2023) Vol. 7 Jurnal Kewarganegaraan 1599.

